

Memperingati Tahun Baru Cina sambil Melestarikan Warisan: Pengalaman Komunitas Cina di Yogyakarta

Rezza Maulana
rezza,maulana@gmail.com

Abstrak

Sejak Gus Dur membolehkan kembali perayaan publik tradisi China di Indonesia dan Megawati menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional, komunitas Tionghoa di berbagai kota besar mulai memperingati Imlek secara terbuka, meriah dan penuh dengan aneka kegiatan. Di Yogyakarta, komunitas Tionghoa tidak hanya menyambut Imlek dengan ritual di klenteng dan berkumpul bersama keluarga di rumah, tetapi juga menggelar sebuah festival budaya selama lima hari berturut-turut. Festival yang dikenal dengan nama Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) inilah yang kemudian menjadi salah satu ruang publik baru sekaligus menjadi media untuk melestarikan warisan budaya Tionghoa, baik yang berwujud (*tangible*) atau nir wujud (*intangible*). Artikel ini mencoba mengelaborasi apa dan bagaimana Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) diselenggarakan.

Keywords: *festival, identitas budaya, perayaan publik, strategi, kolaborasi.*

Abstract

Since Abdurrahman Wahid had revoked the banning of public celebration of Chinese tradition and Megawati had made Chinese New Year (Imlek) as national holiday, Chinese communities in various big cities in Indonesia began celebrating Imlek ceremony and conducting numerous ritual activities. In Yogyakarta, Chinese communities do not only pray in temple and have family gathering, but also organize a festival in five days consecutively. This festival is well-known as Yogyakarta Chinese Cultural Weeks or Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY). Recently, this event has become a new public space which is strategic for conserving Indonesian Chinese cultural heritage, either tangible or intangible. This article tries to elaborate of what and how the Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) traditionally conducted.

Keywords: *festival, cultural identity, public event, cultural strategy, collaboration*

Pendahuluan

Pertama yang perlu saya jelaskan mengenai tulisan ini adalah sebagian besar sumber tulisan berasal dari tesis S2 saya di Jurusan Antropologi Budaya.¹ Penelitian lapangan (observasi partisipatoris) saya lakukan secara formal pada sekitar tahun 2010 hingga 2013 ketika menjadi mahasiswa pascasarjana. Akan tetapi secara informal, saya telah melakukan pengamatan perayaan Imlek publik dalam festival Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) sejak pertama kali digelar pada tahun 2006.

Festival yang digelar secara terbuka dan pertama kali di Yogyakarta sejak kejatuhan rezim Soeharto tahun 1998 tidak hanya menarik perhatian generasi muda Tionghoa, tetapi juga menarik perhatian pemuda (Jawa) lain seperti saya. Oleh karena itu, ketika mendapatkan kesempatan studi lanjut, festival tersebut menjadi pilihan topik penulisan agar dapat lebih memahami dan mengambil pelajaran dari fenomena tersebut.

Kemunculan kembali budaya Tionghoa pasca Orde Baru dipupuk oleh kebijakan pemerintah masa presiden Abdurrahman Wahid No. 6 Tahun 2000 dengan mencabut Intruksi Presiden No 14/ 1967 yang membatasi agama, adat dan tradisi Tionghoa di ruang publik. Kesempatan yang ada tersebut diikuti dengan penyelenggaraan perayaan Imlek di berbagai daerah.

Akan tetapi di awal masa itu, komunitas Tionghoa tidak serta merta menggelar perayaan secara terbuka dan meriah. Mereka menggelar perayaan secara terbatas di dalam gedung atau hotel dengan mengundang beberapa tokoh masyarakat dan pemimpin daerah. Mereka pun menyelenggarakan perayaan secara kolektif berdasarkan kelompok sub suku atau marga, seiring dengan menjamurnya organisasi-organisasi Tionghoa pasca Orde Baru.²

Sama halnya di Yogyakarta, pada awalnya perayaan Imlek publik di lakukan di dalam gedung dan kolektif berdasar

¹ Rezza Maulana, "Reka Cipta Tradisi pada Peringatan Hari Raya Orang Tionghoa di Yogyakarta: Studi Kasus pada Perayaan Imlek, Peh Cun dan Tiong Jiu", Tesis Magister (Yogyakarta: UGM, 205).

² Susan Mary Giblin, "*Being Chinese and Indonesian: Chinese Organization in Post Soeharto Indonesia*", thesis Ph.D, (UK: Departement of East Asian, University of Leeds, 2003).

paguyuban-paguyuban yang telah ada baik lokal atau translokal. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar orang Tionghoa, terutama go-longan tua yang menjadi panitia penyelenggara, masih trauma dengan situasi pasca peristiwa 1965.

Di satu sisi, merayakan Imlek menjadi salah satu usaha dalam membangun kembali identitas diri, tetapi di sisi lain hal ini bisa menjadi persoalan yang bisa menimbulkan kembali sentimen etnis jika tidak dilakukan secara hati-hati. Arief Budiman³ melihat situasi demikian sebagai sebuah dilema baru bagi orang Tionghoa dalam menentukan batasan-batasan saat melestarikan warisan tradisi sekaligus menghindari potensi konflik.

Pada tingkatan tertentu, apakah situasi ini akan mempengaruhi arah perencanaan komunitas dalam menggelar perayaan Imlek di ruang publik? Bagaimana strategi dalam penyelenggaraan Imlek di satu sisi dan mengembalikan warisan tradisi yang telah terkikis di sisi yang lain?

Fenomena yang terjadi pada orang Tionghoa dapat dilacak akar persoalannya pada masa Orde Baru, dimana identitas dan tradisi Tionghoa dibatasi ruang geraknya hingga tersisa di lingkungan keluarga saja. Pemerintah mengikis satu demi satu kehadiran identitas budaya Tionghoa mulai dari kepercayaan, surat kabar, lembaga pendidikan, aksara dan bahasa hingga nama orang.⁴

Ketika berada pada situasi yang lebih terbuka dan bebas, maka wajar jika orang Tionghoa kembali membangkitkan tradisinya. Mereka berusaha menggali dan merekonstruksi kembali tradisi leluhurnya meskipun terkadang tidak sama persis atau malahan baru sama sekali. Fenomena ini dapat dipahami juga sebagai usaha reka cipta kembali tradisi atau *reinventing tradition*.⁵

³ Arief Budiman, "Portrait of the Chinese in Post-Soeharto Indonesia" dalam *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, Tim Lindsey and Helen Pausacker (eds), (Singapore: ISEAS, 2005), h. 100.

⁴ Tim Lindsey, "Reconstituting the Ethnic Chinese in Post-Soeharto Indonesia: Law, Racial discrimination and Reform" dalam Tim Lindsey and Helen Pausacker (eds.), *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, (Singapore: ISEAS, 2005).

⁵ Eric Hobsbawm and Terence Ranger (Ed), *The Invention of Tradition*, (UK: Cambridge University Press, 1989).

Dari perspektif heritage, pendekatan di atas sebenarnya tidak jauh berbeda. Tradisi leluhur atau warisan leluhur bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan dibuat atau diciptakan. Warisan terbentuk dari silang sengkabut praktik kebiasaan dan pengalaman keseharian, tenunan tindakan dan makna yang dapat berubah yang sering disebut sebagai budaya, yang mana para pelaku menentukan beberapa inti yang diistimewakan dan dibubuhi dengan status dan nilai.⁶

Pendapat Hoon⁷ semakin menegaskan bahwa perayaan Imlek tidak sekedar perayaan budaya, tetapi juga kontestasi kepentingan politik, komoditas ekonomi dan peneguhan identitas. Seperti halnya perayaan Imlek yang digagas oleh kelompok MATAKIN yang telah menjadi asset dalam perayaan ritual Khonghucu. Sedangkan kelompok lain seperti Tionghoa Katolik, Protestan dan muslim lebih cenderung pada perayaan budaya. Kelompok terakhir (Tionghoa muslim) pun mengapresiasi Imlek dengan menggelar perayaan Imlek di masjid. Misalnya, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Yogyakarta menggelar pengajian dan sujud syukur di Masjid Syuhada.⁸

Awal mula PBTY

Komunitas Tionghoa di Yogyakarta bukanlah kelompok yang tunggal, melainkan kelompok yang majemuk. Sejak berakhirnya rezim Soeharto, paguyuban Tionghoa bertambah lebih banyak dan

⁶ Regina Bendix, *“Heritage between Economy and Politics: An Assessment from the Perspective of Cultural Anthropology”* dalam Laurajane Smith and Natsuko Akagawa (ed). *Intangible Heritage*. (New York: Routledge, 2009), h. 255.

⁷ Chang-yau Hoon, *“The Politics of Imlek”*, Inside Indonesia No. 95 Jan – Mar 2009, h. 95-114.

⁸ Ubed Abdilah Syarif, *“Perayaan Tahun Baru Imlek di Mesjid: Pembauran Melalui Konversi Agama dan Kontestasi Identitas”*, Tesis Master, (Yogyakarta: CRCS UGM, 2005); . Rezza Maulana, *Tionghoa Muslim / Muslim Tionghoa, Selanjutnya*, (Yogyakarta: Impulse-Kanisius, 2010); Syuan-Yuan Chiou, *“A Controversy Surrounding Chinese Indonesian Muslim’ Practice of Imlek Salat in Central Java”* dalam Siew-Min Sai and Chang Yau Hoon (eds). *Chinese Indonesian Reassessed: History, Religion and Belonging*, (New York: Routledge, 2013).

fragmentatif. Pada awalnya (masa Orde Baru) hanya terdapat paguyuban berbasis pada hobi, olah raga, kematian dan agama. Namun bertambah pada masa reformasi dengan paguyuban berbasis pada sub suku/dialek, aktifitas sosial, marga dan ekonomi politik. Hingga saat ini (2015), setidaknya terdapat 13 paguyuban yang dominan antara lain: Persatuan Islam Tionghoa Indonesia d.h Pembina Iman Tauhid Islam (PITI), Yayasan Bhakti Loka, Perkumpulan Budi Abadi (Hoo Hap Hwee), PUKY (Perkumpulan Urusan Kematian Yogyakarta), Bhakti Putera (afiliasi pada PSMTI), Pamitra (Paguyuban Mitra Masyarakat), Perhimpunan INTI (Indonesia Tionghoa) Pengda Yogyakarta, YPMJ (Yayasan Persaudaraan Masyarakat Jogja), PERWACY (Perhimpunan Warga Cantonese Yogyakarta), Paguyuban Hakka, Hin An Hwee Koan (Perhimpunan Warga Hing Hua), perhimpunan Fu Qing, PASTI atau Paguyuban Alumni Sekolah Tionghoa Indonesia Yogyakarta.

Pada pasca Orde Baru, tidak hanya paguyuban Tionghoa yang bermunculan tetapi juga lembaga pendidikan berbahasa Mandarin dan berita komunitas Tionghoa “press Tionghoa” dalam halaman khusus surat kabar lokal.⁹ Sedangkan menurut data BPS dalam sensus penduduk 2010 jumlah penduduk Tionghoa di Yogyakarta berjumlah 11.545 jiwa.

Meskipun terdapat iklim sosial yang positif, komunitas tidak serta merta menggelar festival di areal publik. Mereka awalnya menggelar perayaan Imlek di sebuah hall hotel dengan mengundang Sri Sultan HB X sebagai Gubernur pada tahun 2000.¹⁰ Saat itu Gubernur dan beberapa tokoh Tionghoa masih menyampaikan pesan agar tidak berlebihan dalam peringatan Imlek.

Munculnya PBTY justru diinisiasi oleh beberapa akademisi dari kampus UGM, antara lain Prof. Murdijati Gardjito, Dr. Ir. Laretna T. Adhisakti dan Drs. Arief Akhyat MA. Posisi sebagai ilmuwan

⁹ Rezza Maulana, “*Halaman Khusus Berita Komunitas: Pengamatan Awal tentang ‘Pers Tionghoa’ di Yogyakarta Pasca Orde Baru,*” makalah dalam *1st International Conference of Media, Communication and Culture*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Universiti sains Malaysia, 2012).

¹⁰ Andreas Susanto, “*Under the Umbrella of the Sultan: Accommodation of the Chinese in Yogyakarta During Indonesia’s New Order*”, Thesis PhD, (Radboud: Universitas Nijmegen, 2008), h. 164.

dengan institusi yang dianggap netral membuat komunitas Tionghoa berani bekerja sama menyelenggarakan festival, meskipun pada awalnya anggota komunitas merasa ragu-ragu dan menaruh curiga.

Setelah saya ketemu walikota, wah ini ide yang pantas didukung. Lalu saya mengumpulkan tokoh-tokoh Tionghoa. Uniknya, orang kampus antusias, pemerintah antusias, juru foto juga, malah saya dapat gratis. Dari kampus Atmajaya juga. Tapi kok anehnya komunitas Tionghoa kurang antusias waktu pertama kali bertemu. Namun setelah saya cari tahu, ternyata komunitas Tionghoa (waktu itu tahun 2006, red) pun terdiri dari 4 grup, ada Hakka, Canton, Bhakti Putera dan Fu qing. Semacam itu. Ternyata mereka masing-masing baru saling menengok, di belakang ini komunitas apa? Tampaknya masing-masing kayak punya ego. Jadi ini pengalaman pertama kenapa komunitas Tionghoa itu kok ragu-ragu.¹¹

Berbekal dukungan dari Pemkot, panitia yang tersusun dari gabungan antara akademisi, birokrat dan komunitas Tionghoa mengumpulkan semua sumber daya (*capital*) yang ada. Para akademisi mengajak dan melibatkan jejaring koleganya di dalam dan di luar kampus yang mempunyai modal budaya – *culture capital*,¹² baik secara umum atau yang khusus mengenai ke-Tionghoa-an. Mereka antara lain praktisi budaya seperti Afif Syukur, Anggi Minarni, Didik Nini Thowok dan Isman Indarto (alm). Termasuk beberapa lembaga seperti perkumpulan batik *Sekar Jagad*, Yayasan Karta Pustaka, sanggar tari Natya Lakshita dan Jogja Heritage Society (JHS).

Sedangkan pihak birokrat (pemkot) yang banyak mempunyai modal politik membantu dengan menggerakkan beberapa kedinasan seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Kehumasan, Bidang Hukum dan Organisasi, Badan Informasi Daerah dan PKK Kota. Di pihak komunitas Tionghoa, keterlibatan mereka masih berdasarkan individu-individu sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Kebanyakan dari mereka tidak hanya

¹¹ Wawancara dengan Prof. Murdijati Gardjito.

¹² David Swartz, *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*, (Chicago: The University of Chicago, 1997).

menyumbang pengetahuan atau pengalaman tetapi juga finansial. Memang pada kenyataannya, sumber dana terbesar pelaksanaan PBTY berasal dari sumbangan komunitas Tionghoa, baik secara individu, institusional atau lewat sponsorship.

Warisanisasi Imlek

Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta telah menjadi salah satu representasi atau etalase dari kebudayaan orang Tionghoa di Yogyakarta. Generasi muda dan masyarakat awam akan melihat dan merekam bahwa yang ditampilkan adalah suatu yang faktual. Rangkaian acara yang ditampilkan merupakan hasil dari kesepakatan panitia lewat belasan pertemuan atau rapat beberapa bulan sebelumnya. Termasuk konsultasi dengan pihak-pihak yang mempunyai pengaruh atau kuasa budaya di daerah seperti Sri Sultan HB X dan Pakualam IX. Konsultasi seperti inilah yang bisa dikate-gorikan dalam usaha komunitas menjajaki batasan-batasan yang aman sebagai minoritas. Salah satu contohnya adalah rencana menampilkan ikon karnaval dalam peringatan sewindu PBTY. Panitia akhirnya menerima usulan dari Sri Sultan HB X untuk membuat gunung dari kue keranjang yang mana menjadi penanda identitas Tionghoa Jawa.

Karnaval di sepanjang jalan Malioboro merupakan pengembangan dari tradisi arak-arakan liong dan samsi yang pada masa lalu rutanya hanya berkeliling kampung dengan titik keberangkatan di klenteng. Pada PBTY yang pertama, arak-arakan liong dan samsi masih bermula dari klenteng Gondomanan hingga kampung Ketandan. Tetapi pada akhirnya rute berawal dari taman parkir Abu Bakar Ali yang terletak di selatan Hotel Garuda dan diakhiri di perempatan Kantor Pos Besar. Karnaval kini juga dimeriahkan dengan lomba atau kompetisi atraksi liong berhadiah jutaan rupiah. Di samping itu, karnaval juga mengikutsertakan penampilan rombongan seni dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di Yogyakarta seperti pelajar asrama daerah, komunitas kreatif dan paguyuban-paguyuban Tionghoa.



Gbr 1. Audiensi panitia di Kepatihan (koleksi Ratana Liem)

Lokasi pusat festival yang berada di kampung Ketandan juga merupakan hasil seleksi diantara beberapa kampung Pecinan atau *Chinatown* yang berada di sekitar Malioboro. Salah satu argumen historis menyatakan bahwa Ketandan merupakan pemukiman penarik pajak di pasar Gede masa awal Kesultanan yang dipegang oleh orang Tionghoa. Festival dilangsungkan selama lima hari karena disesuaikan dengan jumlah sepekan dalam pasaran kalender Jawa. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa kehidupan orang Tionghoa di Yogyakarta juga selaras dengan siklus kehidupan tempat tinggalnya (Jawa).

Pemilihan lokasi di kampung, dimana terdapat panggung hiburan, pameran dan stand bazaar, sudah cukup tepat seperti yang ditegaskan oleh Simatupang¹³ bahwa ciri *urban heritage city* di Asia adalah keberadaan kampung-kampung yang padat penduduknya. Akan tetapi, niatan panitia dan Pemerintah Kota yang ingin menghidupkan kampung Ketandan menjadi area kuliner dan pasar malam sepanjang hari seperti Semawis di Semarang dan Kya-Kya di Surabaya gagal menjadi kenyataan. Hal ini

¹³ Lono Simatupang, *Pergelaran: Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), h. 208.

disebabkan karena kampung ini telah terbentuk sebagai kawasan pedagang perhiasan atau toko emas dan barang grosiran yang beraktifitas di pagi hari hingga sore. Akhirnya, sebagai penanda kampung, komunitas Tionghoa, yang juga panitia, membangun gapura naga di mulut gang menghadap Jalan Malioboro.



Gbr 2. Gapura kampung Ketandan (koleksi penulis)

Selama lima hari penyelenggaraan festival, panitia memanfaatkan ruang-ruang yang ada di kampung sebagai panggung kebu-dayaan Tionghoa Yogyakarta. Pengunjung tidak sekedar disuguhi dengan aneka ragam pertunjukan kesenian peranakan seperti tarian, nyanyian, wayang potehi dan kuliner khas, tetapi juga pameran pakaian (kebaya encim), perlengkapan memasak dan tentunya arsitektur rumah toko (*shophouse*) khas Tionghoa masa kolonial.

Panggung utama di salah satu sudut kampung Ketandan inilah yang dijadikan ruang eksistensi sekaligus sosialisasi dan regenerasi

warisan leluhur. Di samping penampilan seni masing-masing dari berbagai paguyuban Tionghoa, panggung ini juga menjadi ajang penyaluran bakat-bakat dari anak-anak hingga remaja Tionghoa yang sejak 10 tahun terakhir telah mendapatkan kembali pendidikan bahasa dan kesenian Tionghoa di lembaga bahasa atau sekolah-sekolah nasional tiga bahasa.¹⁴

Seperti halnya karnaval, kelompok masyarakat lain seperti kesenian asrama mahasiswa daerah dan sekolah-sekolah umum juga diundang sebagai partisipan hiburan setiap malam harinya. Secara tidak langsung, acara di PBTY ini juga telah membantu meningkatkan intensitas tatap muka berbagai warga agar saling mengenal tradisi masing-masing. Meskipun secara kualitas saya rasakan masih kurang, karena mereka minim dengan ruang-ruang dialog atau pertukaran pikiran sehingga masih memungkinkan untuk terjadi salah interpretasi atau salah paham.

Jalan kampung yang selebar kurang lebih 5 m, sebagian ruasnya menjadi deretan stand pameran dan makanan. Meskipun stand bagian kuliner ditujukan untuk menjual makanan khas Tionghoa, sebagian besar stand justru terisi oleh makanan populer masa kini atau makanan dari Barat. Menurut panitia, banyak penyewa stand, baik orang Tionghoa sendiri atau bukan, lebih cenderung mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menjual barang atau makanan yang umum dan laris. Oleh karena itu, panitia menyiasati dengan mengisi sendiri menu khas beberapa stand dengan bekerjasama dengan paguyuban-paguyuban Tionghoa di Yogyakarta. Selain itu, panitia juga menyisipi dengan pertunjukan seni seperti wayang potehi yang didatangkan dari Gudo, Jawa Timur. Ini dilakukan karena di Yogyakarta tidak ada orang yang bisa memainkan wayang alias dalang wayang potehi. Panitia juga membuat panggung lain di sudut kampung yang berbeda dengan menggelar aneka lomba bagi anak-anak sekolah seperti karaoke, baca puisi dan mendongeng berbahasa Mandarin.

Dengan program acara seperti di atas setidaknya akan melahirkan satu lapis generasi Tionghoa yang mengenal dan memahami warisan tradisinya. Tidak seperti yang terjadi pada generasi yang lahir tahun 1970an dan 1980an dimana mereka

¹⁴ Rezza Maulana, “Reka Cipta Tradisi”, h. 47.

sangat terbatas, jika tidak ingin disebut kesulitan, dalam mengakses dan menghidupi tradisi leluhurnya. Berbeda dengan generasi ORBA yang memiliki keterbatasan akses pada tradisi (peranakan), generasi sekarang dengan mudahnya merujuk pada sumber-sumber yang berasal dari negeri China seiring dengan kemudahan dan kemajuan teknologi informasi saat ini. Apalagi ditambah dengan meningkatnya maha-siswa asal Rep. Rakyat China yang melakukan studi bahasa dan budaya di beberapa kampus di Yogyakarta. Mereka tidak hanya belajar tetapi juga menjadi duta budaya China modern, era keterbukaan pasca Deng Xioping ke Indonesia.



Gbr 4. Pameran kebaya encim di rumah Ketandan (koleksi penulis)



Gbr 5. Stand kue keranjang (koleksi penulis)



Gbr 6. Kolaborasi wayang potehi dan golek (koleksi penulis)

Selain karena bawaan psikologis sebagai kelompok minoritas, kerjasama dengan sponsor atau pihak lain seperti Pemerintah Kotamadya tentunya akan berpengaruh terhadap suksesnya penyelenggaraan festival. Komunitas atau panitia tentu akan mengajak pihak keamanan agar semua agenda berjalan lancar dan

aman. Tidak hanya pihak keamanan resmi dari kepolisian akan tetapi juga lembaga sosial kemasyarakatan seperti Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia (FKPPI).

Meskipun event PBTY diformat sebagai acara publik yang berbasis pada komunitas, kerjasama dengan sponsor perusahaan akan membuat wajah sebagian area dan visual grafis dipenuhi dengan iklan nama dan gambar produk. Sedangkan kerjasama dengan Pemkot terutama yang melibatkan Dinas Pariwisata juga akan menjadikan festival sebagai komoditas pariwisata yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah lewat kunjungan wisatawan dan menggerakkan sektor riil. Apalagi sejak PBTY dimasukkan secara tetap dalam kalender wisata tahunan Pemkot, banyak pihak di lingkungan Pemerintahan Kota dan Provinsi mulai melihatnya sebagai aset tujuan wisata budaya. Namun, kontribusi Pemkot dalam bentuk dana anggaran (hibah) masih jauh dari cukup, mengingat persentasenya hanya sekitar 6 % jumlah total anggaran setiap tahunnya.¹⁵

PBTY sebagai Pertunjukan Rakyat

Beberapa kasus terakhir di atas dimana pemerintah, lembaga dan warga lain mulai terlibat dalam festival dalam rangka peringatan Imlek, semakin menegaskan bahwa Pekan Budaya Tiong-hoa di Ketandan merupakan salah satu pertunjukan rakyat di Yogyakarta.

Pada kenyataannya, maju mundurnya dan hidup matinya pertunjukan rakyat kini bukan merupakan tanggungjawab sepihak, melainkan hasil dari bentuk-bentuk relasi antara warga pemilik pertunjukan rakyat dengan *stake holder* lain. Keterlibatan pemerintah daerah pada pertunjukan rakyat juga seringkali digerakkan oleh kepentingan untuk penggalangan identitas (jati diri) dan ekonomi (pariwisata).¹⁶

Pesan pemerintah yang diwakili oleh Gubernur tersirat dalam salah satu pidato pembukaan PBTY tahun 2014 yang menekankan dan menantang kepada warga (seniman) Tionghoa untuk

¹⁵ Rezza Maulana, “*Reka Cipta Tradisi*”, h. 75.

¹⁶ Simatupang, *Pergelaran*, h. 238.

menciptakan suatu karya baru yang mencerminkan wujud akulturasi budaya Tionghoa Jawa, sekaligus mempertanyakan pada mereka tentang usaha-usaha dalam mengikis jarak atau sekat sosial budaya dan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

. . . dalam berbagai kesempatan pekan budaya ini, saya menantang para seniman Tionghoa agar terpanggil untuk menggarap karya cipta seni sebagai wujud akulturasi budaya abad 21 yang hendaknya disertai gerakan integrasi sosial. Kali ini saya ingin memastikan apakah sudah ada upaya-upaya rintisan ke arah sana untuk membuka sekat-sekat sosial budaya dan dinding pemisah di bidang ekonomi?¹⁷

Penggalangan identitas juga terkait dengan pembentukan identitas kota Yogyakarta yang tersurat sejak PBTY digelar pada tahun 2006. Walikota saat itu mendorong warga yang potensial untuk berkontribusi membentuk keunikan kota, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat yang lebih apresiatif terhadap warga Tionghoa. Dorongan ini disampaikan Walikota dalam sambutannya pada acara penutupan PBTY berikut ini:

Kebudayaan Tionghoa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di kota Yogyakarta. Dalam perjalanan sejarah, kehadiran komunitas Tionghoa di Yogyakarta telah menyumbangkan berbagai hal, seperti: teknologi sederhana penggilingan tebu, makanan yang eksotik, perlengkapan dan alat masak, serta bangunan dan interior khas yang arsitektural Tionghoa. Kebudayaan asli yang dibawa oleh komunitas Tionghoa telah melebur dengan kebudayaan lokal Yogyakarta sehingga dapat diterima oleh masyarakat setempat, misalnya masakan khas Tionghoa telah disesuaikan dengan selera masyarakat Yogyakarta. Demikian pula dalam kehidupan kesehariannya, komunitas Tionghoa menyerap kebudayaan lokal, sehingga terjadi keterpaduan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Terlebih lagi, regulasi pemerintah Indonesia secara serius ingin menghilangkan sekat pribumi-non pribumi berdampak positif pada akselerasi akulturasi budaya masyarakat Tionghoa dengan budaya

¹⁷ Sultan HB X, sambutan pembukaan PBTY 2014.

lain di masyarakat serta memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat Tionghoa untuk berperan dalam pembangunan, seperti yang telah dilakukan dalam kontribusi pembangunan Taman Pintar. Hal ini semakin memperkuat keunikan kota Yogyakarta yang berakar pada budaya Jawa dengan nuansa kultur berbagai daerah lain di Indonesia. Kami berharap, ke depan kegiatan seperti ini semakin ditingkatkan ragam dan kualitas penyelenggaraannya dengan semakin melibatkan berbagai elemen masyarakat agar seluruh masyarakat dapat merasa turut memiliki dan memacu kreatifitas masyarakat dalam melestarikan budaya serta memperkuat rasa kebersamaan dan kerukunan masyarakat yang dapat me-mantapkan eksistensi kota Yogyakarta sebagai *city of tolerance*.¹⁸



Gbr 8. Gunungan kue keranjang (koleksi penulis)

Sedangkan motif penggalangan ekonomi pariwisata dapat terlihat dari pernyataan Ketua Umum PBTY, Tri Kirana Muslidatun, tahun 2012, yang juga merupakan istri dari walikota yang menjabat saat itu.

Bapak gubernur dan hadirin yang berbahagia, besar harapan kami agar pekan budaya Tionghoa dapat memberikan kontribusi

¹⁸ H. Herry Zudianto, sambutan walikota saat penutupan PBTY 2006.

yang positif yang besar buat masyarakat sekitar, baik dalam hal hiburan pengenalan dan pelestarian budaya dan *pendapatan daerah*. Untuk itu kami mohon doa restu dukungan dari semua pihak kami ucapkan terimakasih sebesar-besarnya. Sekali lagi jika panitia dalam pelaksanaannya masih mempunyai kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. *wabilataufik wal hidayah. Wassalamualaikum waroh matullahi barokatuh.....*

Di samping itu, tekanan untuk menarik kedatangan wisatawan secara tidak langsung mendorong panitia untuk bekerja lebih keras menciptakan pagelaran yang lebih meriah dan berbeda setiap tahunnya. Padahal panitia tidak mendapatkan kompensasi semacam upah kerja, tetapi hanya mendapatkan ucapan terima kasih. Sedangkan para partisipan acara hanya mendapatkan *angpao* seadanya, jauh dari standar honorarium penampilan profesional.



Gbr 9. Baliho PBTY 2012 di depan Dinas Pariwisata Provinsi DIY

Beberapa catatan akhir

Sampai tahun 2015 ini, komunitas Tionghoa telah berhasil menyelenggarakan secara rutin PBTY sebanyak 10 kali. Kelancaran pelaksanaan tersebut merupakan hasil kerja keras komunitas Tionghoa yang telah bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat dan birokrat. Salah satu usaha untuk memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja, komunitas Tionghoa menyiasatinya dengan mendirikan organisasi yang bernama *Jogjakarta Chinese Art and Culture Center (JCACC)* pada tahun 2009. Organisasi ini beranggotakan orang-orang perwakilan dari

paguyuban-paguyuban sosial Tionghoa yang sudah ada ditambah dengan beberapa tokoh dan aktifis pemerhati budaya Tionghoa di Yogyakarta.

Organisasi ini sebenarnya mempunyai beberapa divisi yang penting seperti divisi riset, akan tetapi sejauh ini perannya belum maksimal. Bahkan ada seorang kolega lembaga yang merasa bahwa organisasinya tersebut lebih cenderung bekerja sebagai sebuah *event organizer* daripada sebuah organisasi *think thank* dalam kerja-kerja kebudayaan.

Selain itu, beberapa orang yang terlibat dalam penyelenggaraan PBTY, berpendapat bahwa perencanaan dan pengelolaan festival lebih banyak didominasi oleh generasi tua. Mungkin selain masih kentalnya budaya senioritas, yang muda menghormati yang tua, hal ini juga ditambahi oleh jarak perbedaan kelas sosial ekonomi. Generasi tua yang sudah mapan secara ekonomi cenderung berkontribusi dalam bentuk finansial, sedangkan yang lebih muda dan belum mapan akan berkontribusi dalam bentuk tenaga. Para pemuda pemudinya sendiri belum banyak terlibat dalam kepanitiaan, mereka sering tampak sebagai penggembira saja.

Di samping adanya dukungan dalam bentuk organisasi, kesuksesan penyelenggaraan PBTY juga didukung oleh manajemen keuangan kepanitiaan yang baik. Hasil *fundraising* yang jumlahnya melebihi besar rencana anggaran kegiatan akan disimpan untuk modal awal penyelenggaraan festival di tahun berikutnya. Oleh karena JCACC dalam setahun menyelenggarakan perayaan tidak hanya sekali, tetapi tiga kali: yaitu perayaan Tahun Baru (Imlek), perayaan Perahu Naga (Peh Cun) dan perayaan Bulan Purnama (Tiong Jiu), maka *fundraising* pun dilakukan sebanyak tiga kali.

Meskipun demikian, sudah ada warga Tionghoa yang mengatakan bahwa proses *fundraising* berkali-kali itu melelahkan dan berat. Apalagi jika pada tahun tersebut bisnis mereka kurang berkembang. Mereka pun mencoba mencari sumber pendanaan yang lebih stabil seperti bentuk sponsorship dari perusahaan besar atau jalan akses pada dana keistimewaan (danais) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Yogyakarta. Sejauh ini hanya cara pertama yang dapat dicapai oleh kepanitiaan, sedangkan cara kedua masih belum berhasil meskipun Gubernur masuk dalam struktur kepanitiaan sebagai pelindung.

Sayangnya, usaha dalam pelestarian warisan budaya nir wujud ini tidak berbanding lurus dengan usaha pelestarian bangunan budaya Tionghoa seperti rumah toko (*shop house*) bersejarah. Dalam setahun terakhir ini telah terjadi penghancuran dua bangunan cagar budaya demi pembangunan bisnis hotel di kawasan Malioboro, yang sebenarnya merupakan kantong-kantong pemukiman warga Tionghoa. Dua contoh kasus yang telah terjadi adalah dirobohkannya bekas rumah Tan Jin Sing di sekitar Jalan Ahmad Yani (Kedaulatan Rakyat, 28 / 1/ 2015) dan rumah Tjan Blom Thiong di Jalan Pajeksan (Harian Jogja, 10 / 6/ 2015). Meskipun keduanya mempunyai SK Perwal mengenai bangunan cagar budaya (BCB), pihak hotel tetap bisa mendapatkan ijin mendirikan bangunan dari Dinas Perijinan. Yang lebih menyedihkan adalah sebagian pihak yang terlibat dalam penghancuran bangunan cagar budaya merupakan warga Tionghoa sendiri.

Belajar dari pengalaman warga Tionghoa di Yogyakarta, sudah semestinya usaha pelestarian warisan budaya, baik material dan non material, menjadi tanggungjawab semua pihak. Gerakan ini tidak hanya berkoordinasi dengan sesama pelestari atau dengan pengambil kebijakan, tetapi juga pelaku usaha ekonomi dan bisnis agar berbagai warisan berharga dari masa lalu dapat berguna untuk masa kini dan masa depan.

Daftar Pustaka

- Bendix, Regina. 2009. *“Heritage between Economy and Politics: An Assessment from the Perspective of Cultural Anthropology”* dalam Laurajane Smith and Natsuko Akagawa (ed.). *Intangible Heritage*. New York: Routledge.
- Budiman, Arief. 2005. *“Portrait of the Chinese in Post-Soeharto Indonesia”* dalam *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*, Tim Lindsey and Helen Pausacker (eds). Singapore: ISEAS.
- Chiou, Syuan-Yuan. 2013. *“A Controversy Surrounding Chinese Indonesian Muslim’ Practice of Imlek Salat in Central Java”* dalam *Siew-Min Sai and Chang Yau Hoon* (eds). *Chinese Indonesian Reassessed: History, Religion and Belong-ing*. New York: Routledge.

- Giblin, Susan Mary. 2003. *“Being Chinese and Indonesian: Chinese Organization in Post Soeharto Indonesia”*, thesis Ph.D. UK: Departement of East Asian, University of Leeds.
- Heryanto, Ariel. 1998. *“Ethnic Identities and Erasure: Chinese Indonesian in Public Culture”*, dalam *Southeast Asian Identities: Culture and the Politics of Representation in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand*, Joel S. Khan (ed.). Singapore: ISEAS.
- Hobsbawm, Eric and Ranger, Terence (Ed). 1989. *The Invention of Tradition*. UK: Cambridge University Press.
- Hoon, Chang-yau. 2009. “The Politics of Imlek” , 95-114 pp *Inside Indonesia* No. 95 Jan – Mar.
- Lindsey, Tim. 2005. *“Reconstituting the Ethnic Chinese in Post-Soeharto Indonesia: Law, Racial discrimination and Reform”* dalam Tim Lindsey and Helen Pausacker (eds.). *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting* Singapore: ISEAS.
- Maulana, Rezza. 2010. *Tionghoa Muslim / Muslim Tionghoa, Selanjutnya*. Yogyakarta: Impulse-Kanisius.
- Maulana, Rezza. 2012. “Halaman Khusus Berita Komunitas: Pengamatan Awal tentang ‘Pers Tionghoa’ di Yogyakarta Pasca Orde Baru” makalah dalam *1st International Conference of Media, Communication and Culture*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Universiti sains Malaysia.
- Maulana, Rezza. 2015. *“Reka Cipta Tradisi pada Peringatan Hari Raya Orang Tionghoa di Yogyakarta: Studi Kasus pada Perayaan Imlek, Peh Cun dan Tiong Jiu”*, Tesis Magister. Yogyakarta: UGM.
- Simatupang, Lono.2013. *Pergelaran: Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Susanto, Andreas. 2008. *“Under the Umbrella of the Sultan: Accommodation of the Chinese in Yogyakarta During Indonesia’s New Order”*, Thesis PhD, Radboud: Universitas Nijmegen.

Swartz, David. 1997. *Culture and Power: The Sociology of Pierre Bourdieu*. Chicago: The University of Chicago.

Syarif, Ubed Abdilah. 2005. *Perayaan Tahun Baru Imlek di Mesjid: Pembauran Melalui Konversi Agama dan Kontestasi Identitas*. Tesis Master, Yogyakarta: CRCS UGM.